BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Sehingga peneliti dapat memperkaya pengetahuan mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang peneliti kerjakan. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian yang relevan sebagai reverensi bahan kajian pada penelitian yang peneliti kerjakan.

Berdasarkan penelitian Maman Suhendra (2017) "Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (*Public-Private Partnership*) Di Indonesia", penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui skema KPBU dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung program KPBU. Dalam mendukung pelaksanaan program KPBU, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan beberapa fasilitas. Fasilitas dimaksud diberikan dengan memperhatikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek KPBU. Pada tahapan penyiapan proyek, terdapat fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF) yang bertujuan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam menyiapkan proyek KPBU. Fasilitas PDF ini dapat diberikan hingga proyek KPBU mendapat perolehan pembiayaan (*financial close*).

Selain itu, Towaf Totok Irawan 2016 menyebutkan pelaksanaan infrastruktur di berbagai macam aspek, khususnya pelaksanaan infrastruktur sosial sangat sulit untuk dilaksanakan tanpa adanya dukungan kuat dari Pemerintah dalam menjamin

http://digilib.mercubuana.ac.id/

terlaksananya proyek. Hal ini terkait dengan tingkat pengembalian modal dan keuntungan yang tidak menarik bagi sektor swasta untuk menanamkan modal pada infrastruktur sosial. Didalam RPJMN 2015 – 2019, sudah dinyatakan tersedianya alokasi dana APBN/APBD secara reguler setiap tahun untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Diterapkannya berbagai skema pendanaan kreatif seperti mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (*long-term annuity payment*), pembayaran berbasis kinerja (*performance based payment*) dan berbasis ketersediaan (*availability based payment*).

Sementara Bahtiar Rifai 2014 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penentu kesuksesan berlangsungnya PPP dinegara berkembang antara lain :

1. Kapasitas pemerintah yang mumpuni.
2. Kesesuaian antara kebijakan PPP dan kerangka kebijakan sektoral.
3. Terbangunnya kerangka peraturan perundangan yang menjamin pelaksanaan PPP .
4. Terbentuknya kerangka institusional yang terlibat dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja sama yang jelas.
5. Transparan dan kompetitf dalam tahap pengadaan, seleksi dan lelang.
6. Kehati-hatian dalam menyusun dokumen penawaran.
7. Lingkungan usaha yang kondusif.
8. Kemampuan dalam mengatasi tekanan eksternal baik fundamental moneter maupun fiskal.
9. Terdapatnya portofolio masing-masing proyek yang ditawarkan ke pasar secara feasible

http://digilib.mercubuana.ac.id/

10. Terdapatnya kerangka kerja operasional yang jelas.
11. Monitoring yang kuat dan fleksibilitas respon terhadap kejadian/ kondisi yang tidak sesuai.
12. Kemampuan Dukungan pembiayaan yang besar dari lembaga pembiayaan.
13. Distribusi resiko yang bijaksana antara Pemerintah dan swasta.

Sedangkan Afeez Olalekan Sanni dan Maizon Hashim 2014 mengemukakan dalam penelitian nya yang berjudul *Building infrastructure through Public Private Partnerships in subSaharan Africa: Lessons from South Africa* bahwa minimnya keberhasilan proyek PPP di subSahara afrika antara lain dikarenakan, kurangnya kapasitas dan arah kebijakan inkonsistensi dalam kebijakan, ketidakpercayaan di antara lembaga pelaksana pemerintah, bias kebijakan terhadap PPP, biaya partisipasi yang tinggi, teknologi rendah, masalah sosial-budaya dan ekonomi makro, keterlambatan dalam negosiasi, dan kinerja yang buruk. untuk itu perlunya komitmen oleh para peserta publik dan swasta dan harus ada komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi KPS di seluruh wilayah.

Sementara Matteo Rossi dan Renato Civitillo menjelaskan dalam penelitian nya yang berjudul *Public Private Partnership : a general overview in Italy* bahwa berkenaan dengan sistem hukum perlu kesadaran yang lebih besar dari instrumen keuangan dan pembentukan sistem prosedur yang tidak menyebabkan distorsi perilaku dalam sistem. Serta kebutuhan mendesak untuk proyek-proyek infrastruktur tidak Boleh mengurangi fokus pada efisiensi operasi, yang harus diselaraskan dengan patokan, untuk menghindari biaya investasi berdampak terlalu tinggi pada anggaran publik atau pengguna layanan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Dalam penelitian V.V. N. Reddy dan S.M.Reddy 2015 menyebutkan, pertumbuhan investasi proyek infrastruktur PPP di India menunjukan pertumbuhan yang positif namun memiliki distribusi yang tidak merata selama periode 1995-1996 sampai 2012-2013. Investasi proyek infrastruktur PPP juga menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan namun tidak signifikan. Pembangunan infrastruktur juga akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik di India. Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan kebijakan yang baik, namun juga penerapan kebijakan ini dan juga pemantauan yang tepat untuk mempromosikan proyek Kemitraan Publik dan kemitraan dalam pembangunan infrastruktur.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
1	Maman Suhendra	2017	Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership) Di Indonesia	Dari total kebutuhan pendanaan penyedian infrastruktur di indonesia, APBN/D hanya mampu memenuhi sekitar 43,1 % , sementara BUMN hanya memenuhi sekitar 22,2 %	a.Mengetahui bagaimana skema KPBU dilaksanakan di Indonesia. b. Membahas perbedaan skema KPBU dengan skema tradisional via APBN/D. c. Mengetahui fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam mendukung program KPBU ini.	X : identifikasi skema pembiayaan KPBU Dan Konvensional Y : Penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU di Indonesia	studi literatur, studi regulasi	salah satu alternatif untuk menutupi kesenjangan pendanaan infrastruktur di Indonesia adalah menggunakan skema KPBU, dalam skema ini, pihak swasta dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dari tahap penyediaan hingga pemeliharaan aset infrastruktur, perbedaan antara skema konvensional dan skema KPBU, skema konvensional : pengadaan barang dan jasa, skema KPBU : pengadaan badan usaha yang akan bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan jasa infrastrukur

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
2	Afeez Olalekan Sanni dan Maizon Hashim	2014	Building infrastructure through Public Private Partnerships in subSaharan Africa: Lessons from South Africa	kurangnya kapasitas dan arah kebijakan, inkonsistensi dalam kebijakan, ketidakpercayaan di antara lembaga pelaksana pemerintah,bias kebijakan terhadap PPP, biaya partisipasi yang tinggi, teknologi rendah, masalah sosial-budaya dan ekonomi makro, keterlambatan dalam negosiasi, dan kinerja yang buruk	untuk mengidentifikasi tantangan yang mempengaruhi pengembangan infrastruktur di subSaharan Afrika melalui investasi swasta.	X : kebijakan pemerintah akan penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dengan skema PPP. Y: penyediaan infrastruktur dengan skema PPP di sub Saharan afrika	tinjauan praktik kemitraan publik swasta	minimnya keberhasilan proyek PPP antara lain dikarenakan, kurangnya kapasitas dan arah kebijakan inkonsistensi dalam kebijakan, ketidakpercayaan di antara lembaga pelaksana pemerintah, bias kebijakan terhadap PPP, biaya partisipasi yang tinggi, teknologi rendah, masalah sosial-budaya dan ekonomi makro, keterlambatan dalam negosiasi, dan kinerja yang buruk. untuk itu perlunya komitmen oleh para peserta publik dan swasta dan harus ada komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi KPS di seluruh wilayah.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
3	Khrisna Yudi, Ayomi Dita Rarasati, Achmad Jaka Santos Adiwijaya	2017	Stakeholder Management of Jakarta's Light Rail Transit Using Stakeholder Analysis	Belum teridentifikasinya pihak pemangku kepentingan (stakeholder)	Mengidentifikasi stakeholder utama berikut tindakan-tindakan yang perlu dilakukan terhadap stakeholder tersebut	X : Stakeholder pada penyediaan LRT Y : sukses nya penyediaan LRT di Jakarta	Analisis stakeholder	Pihak pemngku kepentinagn utama (key stakeholder) adalah stakeholder yang masuk kedalam kategori *manage closely* dan *key players*
4	V.V. N. Reddy, S.M.Reddy	2015	Public and Private Partnership in Infrastructure Development in India	Meningkatnya permintaan akan fasilitas infrastruktur, namun anggaran pemerintah tidak mampu untuk menutupi biaya pembangunan infrastruktur, untuk itu di perlukannya skema pembiayaan dengan PPP	Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pola investasi di bidang infrastruktur dan Kemitraan Publik dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur secara umum dan menganalisis hubungan antara pembangunan infrastruktur	X : pola investasi Y : hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi	analisis regresi	Studi saat ini menunjukkan pertumbuhan investasi yang positif pada proyek infrastruktur PPP namun memiliki distribusi yang tidak merata selama periode 1995-96 sampai 2012-13. Investasi proyek infrastruktur PPP juga menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan namun tidak signifikan. Pembangunan infrastruktur juga akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik di India.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
					dan pertumbuhan ekonomi secara khusus			Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan kebijakan yang baik, namun juga penerapan kebijakan ini dan juga pemantauan yang tepat untuk mempromosikan proyek Kemitraan Publik dan kemitraan dalam pembangunan infrastruktur
5	Bahtiar Rifai	2014	Implementasi Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum Di Indonesia	Dari berbagai jenis proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh Pemerintah melalui PPP, jenis infrastruktur sosial seperti infrastruktur penyediaan air bersih (water supply) dianggap paling minim diminati oleh	untuk mengetahui implementasi pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur air minum, masingmasing wilayah memiliki latar belakang yang berbeda dalam inisiasi pengembangan kerja sama Pemerintah-Swasta	X : karakteristik, pencapaian, permasalahan dan tantangan KPS Y : pembangunan Infrastruktur sektor air minum	deskriptif kualitatif.	faktor penentu kesuksesan berlangsungnya PPP dinegara berkembang : 1. Kapasitas pemerintah yang mumpuni. 2. Kesesuaian antara kebijakan PPP dan kerangka kebijakan sektoral. 3. Terbangunnya kerangka peraturan perundangan yang menjamin pelaksanaan PPP . 4. Terbentuknya kerangka institusional yang terlibat dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja sama yang jelas. 5. Transparan dan kompetitf dalam tahap pengadaan, seleksi dan lelang. 6. Kehati-hatian

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
				swasta karena memiliki tingkat keuntungan yang rendah				dalam menyusun dokumen penawaran. 7. Lingkungan usaha yang kondusif. 8. Kemampuan dalam mengatasi tekanan eksternal baik fundamental moneter maupun fiskal. 9. Terdapatnya portofolio masing-masing proyek yang ditawarkan ke pasar secara feasible 10. Terdapatnya kerangka kerja operasional yang jelas. 11. Monitoring yang kuat dan fleksibilitas respon terhadap kejadian/ kondisi yang tidak sesuai. 12. Kemampuan Dukungan pembiayaan yang besar dari lembaga pembiayaan. 13. Distribusi resiko yang bijaksana antara Pemerintah dan swasta.
6	Towaf Totok Irawan	2016	Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan Infrastruktur	a. Penyiapan proyek yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dengan	untuk merumuskan rekomendasi potensi dan peluang pembangunan	X : analisa multi kriteria Y : Pembangunan infrastruktur	deskriptif kualitatif.	pelaksanaan infrastruktur sosial sangat sulit untuk dilaksanakan tanpa adanya dukungan kuat dari Pemerintah dalam menjamin terlaksananya proyek. Hal ini

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
			Di Sektor Sosial Dengan Skema KPBU	badan usaha belum dilakukan atau dipersiapkan dengan baik. b. Belum semua Kementerian/Lembaga/Daerah memiliki unit KPBU di masing masing K/L/D atau kalau sudah ada, tidak berfungsi dengan baik. c. Adanya kesenjangan peraturan antarsektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah terkait mekanisme pembiayaan	infrastruktur di sektor sosial dengan menggunakan skema KPB	di sektor sosial dengan skema KPBU		terkait dengan tingkat pengembalian modal dan keuntungan yang tidak menarik bagi sektor swasta untuk menanamkan modal pada infrastruktur sosial. Didalam RPJMN 2015 – 2019, sudah dinyatakan tersedianya alokasi dana APBN/APBD secara reguler setiap tahun untukpenyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Diterapkannya berbagai skema pendanaan kreatif seperti mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (long-term annuity payment), pembayaran berbasis kinerja (performance based payment) dan berbasis ketersediaan (availability based payment).

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
7	Aki Aapaoja, Harri Haapasalo	2014	A Framework for Stakeholder Identification and Classification in Construction Projects	Konstruksi diterapkan di lingkungan yang sangat menuntut dan kompleks di mana proyek dilaksanakan oleh koalisi beberapa pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan, sasaran, dan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Proyek-proyek ini menghadapi	untuk membantu manajer proyek dalam memfasilitasi manajemen pemangku kepentingan dan rekayasa kebutuhan, terutama di tahap Inisiasi proyek	X : identifikasi,klasifikasi dan analisis pemangku kepentingan Y : fasilitas manajemen pemangku kepentingan	wawancara dan kuisioner, mengulas penelitian terdahulu, identifikasi proyek stakeholder, analisis manajemen stakeholder proyek	Identifikasi, klasifikasi, dan analisis pemangku kepentingan yang tepat sangat penting untuk dikoleksi dan dikelola dengan baik. kesalahan penilaian di Proses ini bisa menyebabkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, Kerangka yang dibangun disajikan dalam makalah ini memudahkan identifikasi, klasifikasi dan pengelolaan pemangku kepentingan proyek dalam hal fungsionalitas peran stakeholder proyek, arti penting dan probabilitas untuk dampak / kemampuan untuk berkontribusi pada proyek.
8	Aristeidis Pantelias, Athena Roumboutsos	2015	A Conceptual Framework for Transport Infrastructure PPP Project Credit Assessments	ketepatan dan perbandingan penilaian kredit proyek menjadi penting terutama bagi keberhasilan	kerangka konseptual untuk menilai kelayakan kredit proyek berdasarkan studi risiko yang dihadapi	X : analisis kelayakan kredit Y : kerangka konseptual penilaian kelayakan kredit	deskritif-kualitatif	penekanan tidak boleh beralih dari proyek ke sponsor proyek atau mitra sektor publik karena hal ini mungkin tidak mencerminkan status risiko proyek itu sendiri. Selain itu, banyak parameter aset

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
				pembiayaan atau pembiayaan kembali proyek.	selama siklus hidup proyek infrastruktur transportasi			yang penting untuk peran dan operasi infrastruktur transportasi, seperti persaingan, efek jaringan, dan risiko permintaan, harus digabungkan dalam pendekatan metodologis dan harus diberi bobot yang sesuai di mana dan kapan.
9	Lidia Mayangsari, Santi Novanti	2015	Multi-stakeholder co-creation analysis in smart city management : an experience from Bandung, Indonesia	Pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan menyiratkan tantangan dalam domain kota dari sumber daya alam dan kapasitas infrastruktur sebagai aspek yang sulit bagi segregasi sosial sebagai aspek lunak. Evolusi ini membutuhkan	mengusulkan model representatif dari pemangku kepentingan dengan nilai-nilai yang ditunjuk, aliran layanan, dan hasil akhir yang diharapkan dari platform layanan konseptual . Model ini bertujuan untuk	X : analisis stakeholder Y : penyediaan model multi stakeholder untuk kota pintar	analisis kualitatif	Walikota kota, dewan kota, komite strategis, dan aliansi kota cerdas adalah para pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pemungkin layanan. Universitas, lembaga penelitian, unit kerja kota, dan profesional adalah pemangku kepentingan kota pintar Bandung yang mewakili kolaborasi organisasi publik dan swasta dan bertindak sebagai tulang punggung pengetahuan proyek. Para pemangku kepentingan berikutnya adalah utilizer layanan yang disusun oleh perusahaan sektor swasta

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
				refleksi dan tindakan nyata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik di kota. Konsep kota cerdas muncul sebagai inovasi strategis untuk membatasi masalah yang muncul oleh pertumbuhan penduduk perkotaan dan memenuhi tantangan perkotaan	menggambarkan kontribusi mendalam dari para pemangku kepentingan yang juga mengarah pada inovasi penciptaan platform layanan			seperti perusahaan ICT, perusahaan konsultan, perusahaan bisnis, dan start-up ICT. Mereka memiliki teknologi yang merupakan akar inovasi di kota pintar Bandung. pihak yang paling penting di kota pintar Bandung dari perspektif ilmu layanan adalah pengguna yang terdiri dari warga negara, LSM, dan pengunjung atau wisatawan. Pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya pribadi lainnya juga merupakan modal dari kota pintar Bandung karena mereka dapat diintegrasikan bersama dengan yang dimiliki oleh yang memungkinkan, penyedia, dan pemanfaatan.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Lanjutan)

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Tujuan	Variabel	Metode	Kesimpulan
10	Taufik Kurniawan	2017	Co-Management Inter Stakeholder As A Public-Private Partnership Model In Development Program For Rural Infrastructure	Percepatan pembangunan perdesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Hal ini karena kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan perdesaan makin terbatas	untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pembangunan infrastruktur desa berbasikan kemitraan yang selaras dengan program pembangunan perdesaan secara terstruktur, sistematis, keberlanjutan, dan konsisten	X : akademisi, bisnis, masyarakat dan pemerintah Y : Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan	deskriptif dan analisis data primer maupun sekunder	Hasil penelitian ini dan beberapa studi yang menerapkan co-management, menunjukkan bahwa pendekatan co-management dapat diterapkan untuk pengaturan infrastruktur. 2. Hasil pembahasan dalam konteks co management antar stakeholder dengan unsur-unsur A-B-C-G, menunjukkan peran OMS (Community = C) menunjukkan peran yang paling dominan dibandingkan dengan stakeholders lain.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.2 Stakeholder

Menurut Freedman (1975), *stakeholders* merupakan kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. *Stakeholders* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dkk (2008), yaitu mempunyai: kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program.

Analisis *stakeholders* diperlukan untuk mengetahui peran masing–masing *stakeholders* yang merupakan semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah program.

Analisis *stakeholders* dilakukan menggunakan metode pendekatan yang dikembangkan oleh Groenendijk (2003) untuk mengetahui peranan dan fungsinya. Metode tersebut diawali dengan mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dan mengklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya secara langsung/tidak langsung dengan proyek yang ada. Kemudian, tiap *stakeholders* yang berbeda tersebut tentunya memiliki atribut yang berbeda untuk dikaji sesuai dengan situasi dan tujuan dari analisis.

Atribut yang dimasukkan dalam analisis adalah pengaruh *(influence)* dan kepentingan *(interest).* Menurut Reed et al. (2009), analisis *stakeholders* dilakukan dengan cara:

1. Melakukan identifikasi *stakeholders*.
2. Mengelompokkan dan membedakan antar *stakeholders*.
3. Menyelidiki hubungan antar *stakeholders*.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Menurut Bryson (2004) dan Reed et al. (2009) untuk memperjelas peran masing masing *stakeholders* dapat menggunakan matriks pengaruh *(influence)* dan kepentingan *(interest)* dengan membedakan *stakeholders* ke dalam beberapa kategori *key players, context setters, subjects* dan *crowd*. Bisa juga menggunakan metode *power* and *interest* grid (IFC 2007) yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi *manage closely, keep statisfied, keep informed* dan *monitor* dengan menggunakan matriks pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). Kepentingan (*interest*) merujuk pada kebutuhan *stakeholders* dalam pencapaian *output* dan tujuan (Reed et al. 2009) sedangkan kekuatan (*power*) merujuk pada pengaruh *stakeholders* pada metode *power* and *interest grid* merujuk pada kekuatan pengaruh yang dimiliki *stakeholders* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan. Penjelasan dari klasifikasi *stakeholders* adalah sebagai berikut:

1. *Context setter* atau *keep statisfied* memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan untuk harus dipantau.
2. *Key player* atau *manage closely* merupakan *stakeholders* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/program.
3. *Subjects* atau *keep informed* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholders lainnya.
4. *Crowd* atau *monitor* merupakan *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini

http://digilib.mercubuana.ac.id/

menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

5. *Key Stakeholder* adalah pihak pemangku kepentingan yang masuk kedalam kategori *Key Player* dan *Manage Closely* yaitu *stakeholder* yang mempunyai kekuatan, kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/program.

2.3 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. (PERPRES NO 38 Tahun 2015)

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau

http://digilib.mercubuana.ac.id/

e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Program KPBU ditawarkan melalui dua skema kerjasama, yakni pemberian konsesi pengelolaan untuk proyek infrastruktur baru yang dibangun melalui pembiayaan oleh swasta, dan kedua menawarkan skema pengelolaan asset yang telah beroperasi (kerja sama pemanfaatan barang milik Negara)

2.4 Simpul KPBU

Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagai PJPK dalam melaksanakan kegiatan KPBU membentuk simpul KPBU yang melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Daerah atau unit kerja baru yang dibentuk dalam lingkungan Kementerian/ Lembaga/Daerah. Tujuan pembentukan simpul KPBU yaitu melakukan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi pada tahap perencanaan dan penyiapan kegiatan KPBU, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.

Simpul KPBU berperan penting pada tahap manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU. Simpul KPBU membantu PJPK untuk mengawasi jalannya pelaksanaan KPBU sesuai dengan hal hal yang disepakati dalam perjanjian KPBU. Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan pada masa prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial dan masa berakhirnya perjanjian KPBU. Pada masa prakonstruksi, simpul KPBU melaksanakan pengawasan pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan (*financial close*).

Pada masa konstruksi, simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan rancangan fasilitas baru, maupun penggabungan fasilitas baru dengan fasilitas yang telah ada.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Simpul KPBU dapat melaporkan kepada PJPK apabila terdapat permasalahan terkait dengan kegagalan dan ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi perjanjian KPBU, permasalahan mengenai tenaga kerja dan risiko yang ditanggung oleh PJPK.

Simpul KPBU memantau jadwal konstruksi, variasi desain konstruksi, kesiapan pekerjaan, kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi. Pada masa operasi simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemantauan standar kinerja layanan sesuai dengan perjanjian KPBU. Menjelang masa berakhirnya perjanjian KPBU, jika bentuk KPBU menggunakan opsi pengalihan, simpul KPBU mempertimbangkan pengalihan kembali aset kepada PJPK. Simpul KPBU melakukan penilaian aset semua komponen sarana yang termasuk dalam perjanjian KPBU. Dalam pelaksanaan tugasnya, simpul KPBU dibantu oleh tim KPBU dan panitia pengadaan.

Simpul KPBU bertugas melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.

2.4.1 PPP Center di Filipina

Berdasarkan seri Executive Order No. 8 tahun 2010, sebagaimana diubah oleh Executive Order No. 136 series tahun 2013, KPS Pusat diberi mandat untuk memfasilitasi pelaksanaan Program dan Proyek KPS negara tersebut.

KPS Pusat adalah pendorong utama Program KPS. Ini berfungsi sebagai badan koordinasi dan pemantauan pusat untuk semua proyek PPP di Filipina. Program ini memperjuangkan Program KPS negara dengan memungkinkan lembaga pelaksana dalam semua aspek persiapan proyek, mengelola Fasilitas Pengembangan dan Pemantauan Proyek (PDMF), menyediakan layanan penasehat dan fasilitasi proyek,

http://digilib.mercubuana.ac.id/

memantau dan memberdayakan lembaga melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas.

KPS Pusat memberikan bantuan teknis kepada lembaga pemerintah nasional (NGA), perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan pemerintah (GOCCs), lembaga keuangan pemerintah (GFI), universitas dan perguruan tinggi negeri (SUC), dan unit pemerintah daerah (LGU) serta ke sektor swasta untuk membantu mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur penting dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

KPS Pusat juga mengadvokasi reformasi kebijakan untuk memperbaiki kerangka hukum dan peraturan yang mengatur KPS untuk memaksimalkan potensi besar proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di negara ini.

Melalui EO 136, KPS Pusat akan bertindak sebagai Sekretariat Dewan Pengatur KPS. Dewan adalah badan pembuat kebijakan secara keseluruhan untuk semua masalah terkait PPP, termasuk Fasilitas Pengembangan dan Pemantauan Proyek. Badan ini bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis Program KPS Filipina dan menciptakan kebijakan yang memungkinkan dan lingkungan kelembagaan untuk KPS.

Fungsi dari PPP Center :

1. Melaksanakan fasilitasi dan bantuan proyek kepada badan pelaksana nasional, termasuk perusahaan pemerintah dan Unit Pemerintah Lokal (LGU) dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program dan proyek PPP
2. Memberikan layanan konsultasi, bantuan teknis, pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada lembaga / LGU dalam persiapan dan pengembangan proyek KPS.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3. Merekomendasikan rencana, kebijakan dan pedoman implementasi terkait dengan KPS dalam konsultasi dengan komite pengawasan yang tepat, lembaga pelaksana, LGU dan sektor swasta
4. Mengelola dan mengelola Fasilitas Pengembangan dan Pemantauan Proyek, dana bergulir yang digunakan untuk persiapan kasus bisnis, pra-kelayakan dan studi kelayakan dan dokumen tender program dan proyek PPP.
5. Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan program dan proyek PPP prioritas dari lembaga / LGU, yang akan dirumuskan oleh masing-masing instansi / LGU dengan koordinasi dengan Sekretariat Badan Pembangunan Ekonomi Nasional (NEDA).
6. Membentuk dan mengelola sistem basis data pusat dari Program dan Proyek KPS.
7. Merekomendasikan perbaikan jadwal waktu dalam memproses program KPS dan proposal proyek, dan memantau kepatuhan semua lembaga / LGU.
8. Menyusun laporan tentang pelaksanaan program-program PPP dan proyek-proyek pemerintah untuk diserahkan kepada Presiden pada setiap akhir tahun.
9. Menjalankan fungsi-fungsi lain yang mungkin penting dalam mempercepat dan melaksanakan secara efektif Program-Program KPS dan Proyek-proyek Pemerintah.

Kerangka kerja logis yang direvisi PPPC diperlihatkan pada Gambar 2.5, Gambar tersebut menunjukkan hubungan program, kegiatan dan proyek dari Pusat KPS dalam mencapai tujuan kemasyarakatan untuk mengurangi kemiskinan dalam berbagai dimensi dan menciptakan pekerjaan yang berkualitas.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Gambar 2.1 PPP Revised Logical Framework

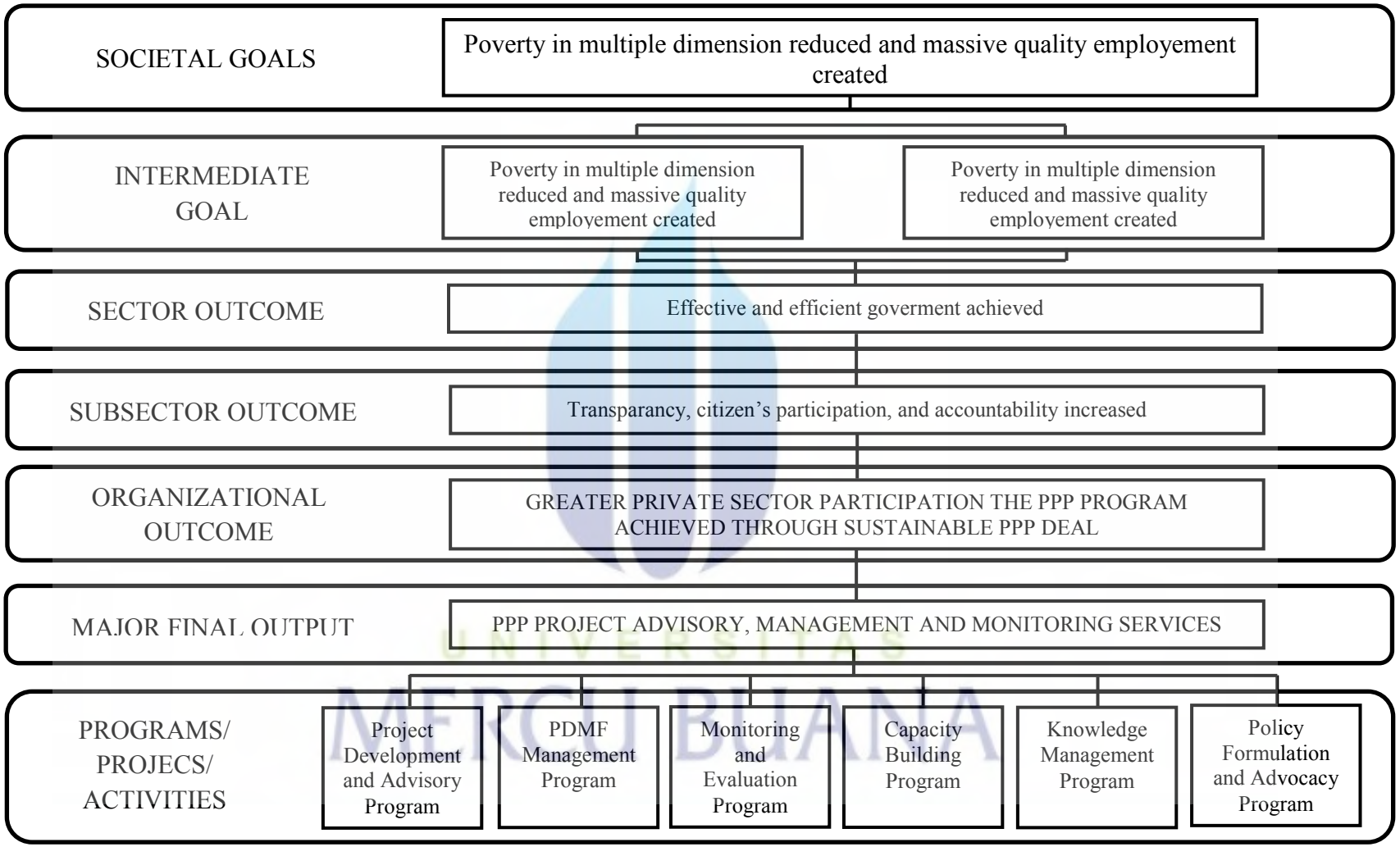

Sumber : Operational manual PPP Center Republic of Philippines, 2015

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PPP Center of Philippines

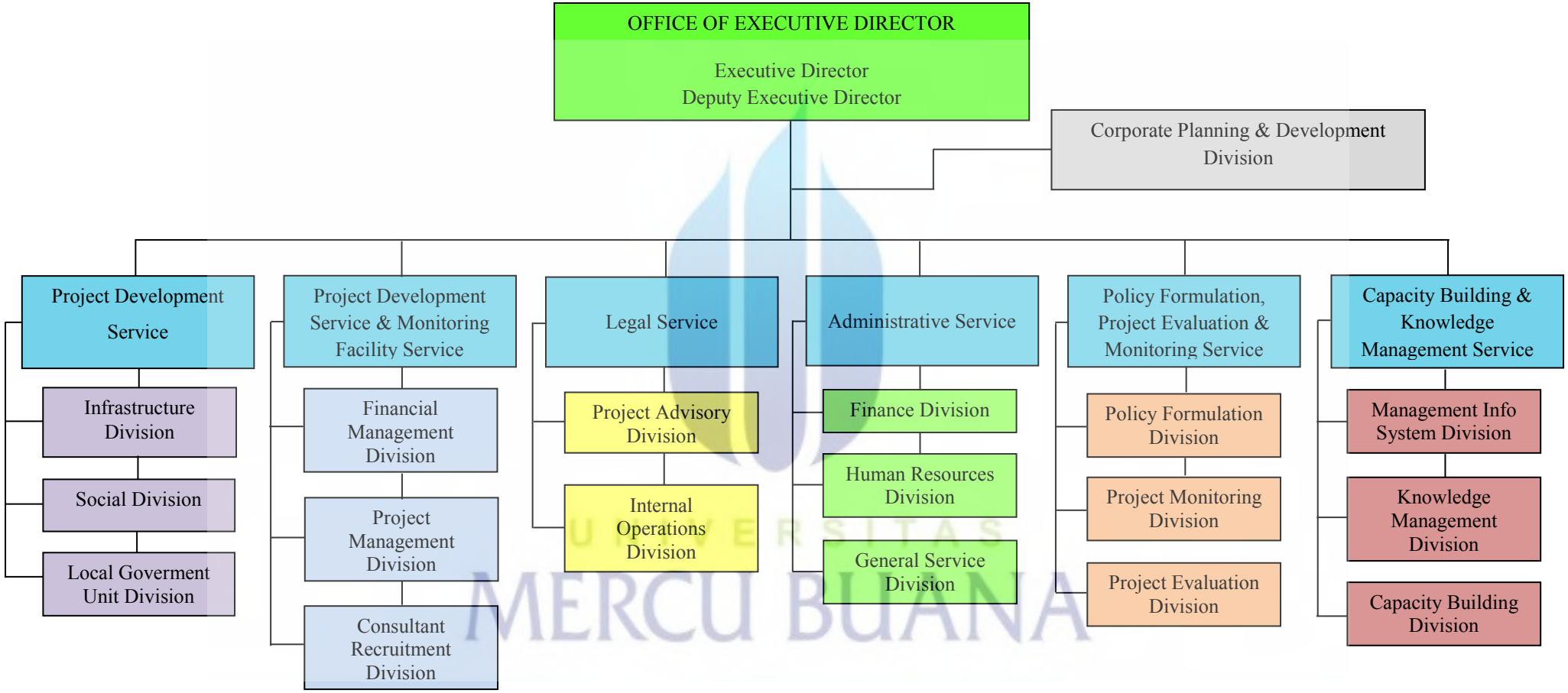

Sumber : Operational manual PPP Center Republic of Philippines, 2015

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.4.2 PPP Center di Korea Selatan

PPP Investment Management Center (PIMAC) adalah lembaga yang bernaung dibawah Korea Development Institute (KDI). PIMAC berfungsi sebagai *gatekeeper* pengadaan investasi publik dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi manajemen investasi publik dan swasta dan menyediakan berbagai layanan konsultasi dan penelitian untuk meningkatkan kebijakan terkait dan alat analisis. Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (PPP) mengacu pada pengaturan di mana sektor swasta membangun dan mengoperasikan fasilitas infrastruktur untuk membantu menyediakan dan memberikan layanan publik atas nama pemerintah. Pengetahuan modal dan teknologi / manajerial dari sektor swasta dimanfaatkan melalui PPP untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas infrastruktur pemerintah yang secara tradisional bertanggung jawab atas (jalan, kereta api, sekolah, limbah sistem, dll.).

Selama periode proyek, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama secara berkelanjutan untuk menyediakan layanan publik yang terkait dengan fasilitas infrastruktur. Korea memperkenalkan program Kemitraan Pemerintah-Swasta dengan diberlakukannya Undang - undang Promosi Modal Swasta menjadi Investasi Modal Sosial Overhead di tahun 1994. Proyek PPP digunakan untuk memusatkan infrastruktur transportasi, tetapi sejak itu revisi UU KPS pada tahun 2005, ruang lingkup proyek KPS potensial saat ini mencakup infrastruktur sosial yang terkait erat dengan kehidupan orang sehari-hari, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, pusat budaya dan olahraga, serta perumahan umum.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Pasal 20 Ayat 1 dari Keputusan Penegakan UU KPS menjelaskan peran PIMAC sebagai berikut :

1. Dukungan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan perumusan Rencana Dasar.
2. Dukungan untuk pekerjaan mengenai formulasi Permohonan Proposal sebagai diatur dalam UU KPBU.
3. Dukungan untuk pekerjaan terkait penunjukan pemegang konsesi seperti tinjauan dan penilaian proposal proyek, dan kesimpulan dari perjanjian konsesi.
4. Mengkaji dan menilai proposal proyek oleh pihak di sektor swasta.
5. Memproses berbagai aplikasi untuk hal-hal seperti persetujuan dan izin mengenai proyek PPP untuk organisasi lain.
6. Layanan dukungan untuk investor swasta asing seperti konsultasi investasi dan kegiatan lain untuk mendorong investasi asing ke proyek-proyek KPS.
7. Kajian proyek PPP potensial dan studi kelayakannya.
8. Pengembangan dan pengoperasian program peningkatan kapasitas terkait dengan implementasi proyek-proyek KPS.
9. Peningkatan sistem investasi swasta dan penelitian bidang terkait.
10. Menemukan proyek PPP potensial dan dukungan untuk pekerjaan yang terkait dengannya.
11. Pekerjaan lain yang terkait dengan pelaksanaan Proyek KPS.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Jenis Fasilitas Infrastruktur PPP

Menurut UU PPP dan Keputusan Penegakannya, berikut fasilitas di 18 sektor yang didefinisikan sebagai jenis infrastruktur yang memenuhi syarat untuk proyek-proyek KPS.

Tabel 2.2 Jenis Infrastruktur Yang Memenuhi Syarat Untuk Proyek PPP

Tipe Infrastruktur	Tipe Fasilitas Infrastruktur
Jalan	• Jalan dan aplikasinya • Tempat parkir di luar jalan • Pusat transfer intermodal, sistem transportasi cerdas • Garasi umum untuk taksi
Rel	• Kereta api • Kereta api perkotaan • Fasilitas kereta api
Pelabuhan	• Fasilitas Pelabuhan • Fasilitas Pelabuhan Perikanan • Fasilitas infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan baru ke jaringan arteri pendukung
Bandara	• Fasilitas Bandara
Sumberdaya air	• Bendungan serbaguna • Fasilitas sungai • Sistem pengerjaan air • Saluran air menengah
Informasi dan Komunikasi	• Fasilitas telekomunikasi • Informasi berkecepatan tinggi dan jaringan komunikasi • Jaringan informasi dan komunikasi • Sistem informasi spasial • Infrastruktur untuk kota-kota (pintar) di mana-mana
Energi	• Fasilitas sumber listrik • Fasilitas pasokan gas • Fasilitas energi terintegrasi • Fasilitas energi baru dan terbarukan
Lingkungan	• Sistem pembuangan limbah, fasilitas pengolahan limbah umum, fasilitas kotoran • Fasilitas untuk penggunaan kembali limbah dan air limbah

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Tipe Infrastruktur	Tipe Fasilitas Infrastruktur
Lingkungan	• Fasilitas pembuangan limbah • Fasilitas terminal pengolahan air limbah • Fasilitas perawatan umum Fasilitas daur ulang
Distribusi	• Terminal logistik, kompleks logistik • Terminal bus
Budaya, Olahraga dan Pariwisata	• Fasilitas wisata, kompleks resor • Fasilitas olahraga khusus, fasilitas olahraga umum • Perpustakaan • Museum, galeri seni • Fasilitas konferensi internasional • Fasilitas budaya • Fasilitas untuk bersepeda • Fasilitas rekreasi pemuda • Museum sains • Taman kota
Pendidikan	• Taman kanak-kanak • Sekolah dasar dan menengah • Fasilitas pendidikan tinggi
Pertahanan Nasional	• Instalasi yang melekat pada unit militer untuk pendidikan, pelatihan dan tujuan lainnya
Perumahan	• Perumahan sewa umum
Kompleks Industri	• Infrastruktur klaster industri
Kesejahteraan	• Fasilitas perawatan • Fasilitas perawatan anak • Fasilitas perawatan perumahan untuk orang tua, fasilitas perawatan medis untuk orang tua, • Fasilitas perawatan di rumah untuk orang tua • Fasilitas layanan kesehatan dan medis umum • Fasilitas kesejahteraan bagi penyandang cacat
Distribusi	• Hutan alam dan rekreasi • Arboretum
Kantor Publik	• Bangunan kantor publik terbatas pada lembaga afiliasi pemerintah pusat (tidak termasuk departemen kepolisian dan kantor polisi setempat)
Kremasi	• Fasilitas kremasi

Sumber : Korean Development Institute, 2018

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PPP *Investment Management Center* (PIMAC)

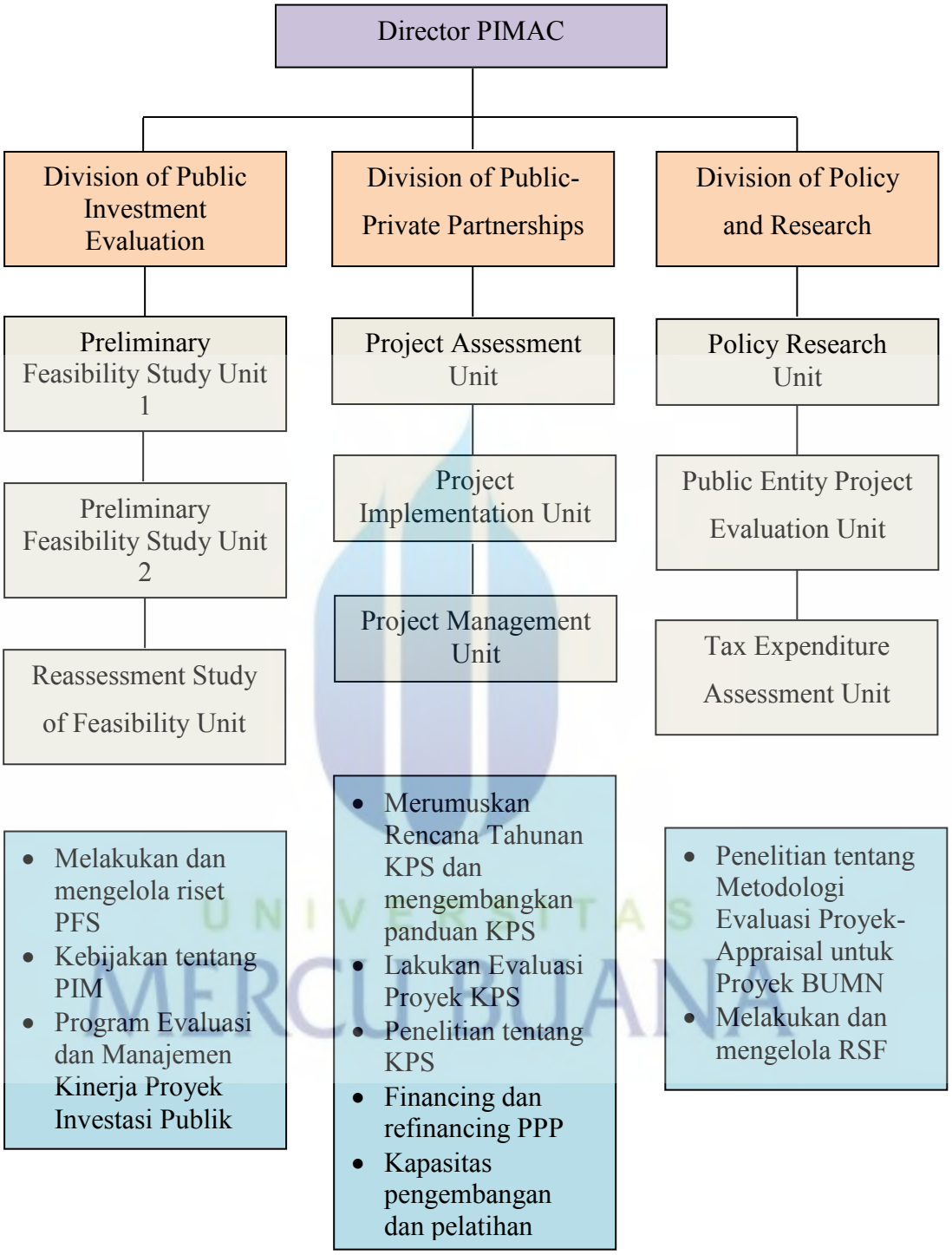

Sumber : Korean Development Institute, 2018

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.4.3 PPP Center di Rusia

Asosiasi "Pusat Pengembangan Kemitraan Pemerintah-Swasta" (PPP *Development Centre*) didirikan pada tahun 2009. Sejak pendiriannya, Pusat Pengembangan KPS telah mengkonsolidasikan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan infrastruktur publik dengan menggunakan PPP. Hari ini PPP *Development Centre* adalah salah satu pusat keahlian PPP utama di Rusia.

Tujuan pendirian PPP *Development Center* adalah untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk percepatan pengembangan dan modernisasi infrastruktur publik Rusia yang menerapkan model PPP melalui :

- Dukungan organisasi, informasi, metodologis dan pendidikan untuk kepentingan anggota Asosiasi.
- Promosi dan perlindungan kepentingan anggota Asosiasi.
- Mengembangkan hukum dan peraturan di bidang PPP.

Prioritas Utama PPP Development Center :

- Meningkatkan keahlian peserta PPP.
- Meningkatkan kualitas manajemen proyek dan persiapan untuk mitra publik dan swasta.
- Membentuk lingkungan kelembagaan yang diperlukan dan meningkatkan undang-undang dan tindakan regulasi di sektor PPP untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- Manajemen proyek PPP dalam entitas resmi Rusia (bantuan dalam mencapai KPI regional).
- Menarik otoritas publik bersama, perusahaan infrastruktur dan investor dan meningkatkan efektivitas kerja sama.

UNIVERSITAS MERCU BUANA
http://digilib.mercubuana.ac.id/

Hasil utama dari kegiatan PPP Development Center selama periode 2009-2014 adalah:

- 72 undang-undang dan tindakan regulasi tingkat federal dan regional dievaluasi.
- lebih dari 20 proyek penelitian dilakukan dalam kerja sama erat dengan otoritas pemerintah.
- 32 perjanjian kerjasama ditandatangani dengan entitas resmi Rusia.
- 17 nota kerja sama disimpulkan dengan Unit PPP asing
- ahli kami berkontribusi pada pelaksanaan proyek-proyek PPP senilai lebih dari 600 miliar rubel.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi PPP Center Rusia

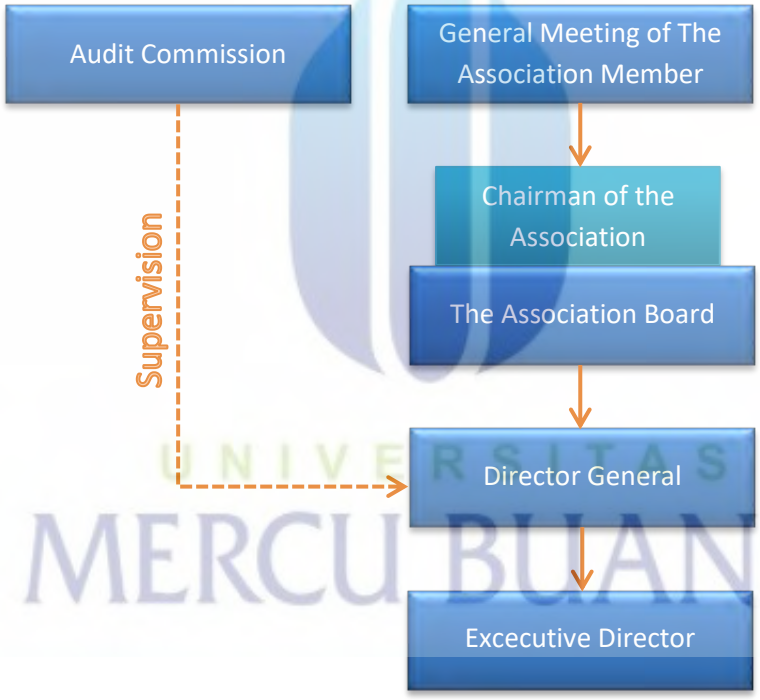

Sumber : PPP Development Center Rusia, 2015

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.5 Unit Kerja / SKPD di Provinsi DKI Jakarta

2.5.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PERGUB NO 253 TAHUN 2016)

2.5.2 Badan Pengelola Keuangan Daerah

BPKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. (PERGUB NO 254 TAHUN 2016)

2.5.3 Badan Pengelola Aset Daerah

BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan aset. BPAD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset daerah. (PERGUB NO 255 TAHUN 2016)

2.5.4 Badan Kepegawaian Daerah

BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian. BKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian. (PERGUB NO 256 TAHUN 2016)

2.5.5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPSDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan. BPSDM mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang

http://digilib.mercubuana.ac.id/

urusan pemerintahan bidang pengembangan kompetensi SDM. (PERGUB NO 257 TAHUN 2016)

2.5.6 Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

BP BUMD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD. BP BUMD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang. keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD. (PERGUB NO 259 TAHUN 2016)

2.5.7 Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta

BPPBJ merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. BPPBJ mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. (PERGUB NO 261 TAHUN 2016)

2.5.8 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan PMPTSP. (PERGUB NO 281 TAHUN 2016)

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.5.9 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Kominfo dan Statistik merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Kominfo dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. (PERGUB NO 265 TAHUN 2016)

2.5.10 Dinas Perindustrian dan Energi

Dinas Perindustrian dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang industri dan energi. Dinas Perindustrian dan Energi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, evaluasi perindustrian dan energi. (PERGUB NO 267 TAHUN 2016)

2.5.11 Dinas Ketahanan pangan, Kelautan, dan Pertanian

DKPKP merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. DKPKP mempunyai tugas melaksanakan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. (PERGUB NO 268 TAHUN 2016)

2.5.12 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan. (PERGUB NO 269 TAHUN 2016)

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.5.13 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan. (PERGUB NO 270 TAHUN 2016)

2.5.14 Dinas Sumber Daya Air

Dinas Sumber Daya Air merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, dan drainase. Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan pengamanan sumber daya air. (PERGUB NO 272 TAHUN 2016)

2.5.15 Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang Bina Marga. Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan, dan jembatan beserta bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan. (PERGUB NO 273 TAHUN 2016)

2.5.16 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman . Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. (PERGUB NO 274 TAHUN 2016)

2.5.17 Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. (PERGUB NO 275 TAHUN 2016)

2.5.18 Dinas Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pemuda Dan Olahraga merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan. (PERGUB NO 276 TAHUN 2016)

2.5.19 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (PERGUB NO 277 TAHUN 2016)

2.5.20 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (PERGUB NO 278 TAHUN 2016)

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.5.21 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah, serta perencanaan pertanahan. (PERGUB NO 279 TAHUN 2016)

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.6 Kerangka Berpikir

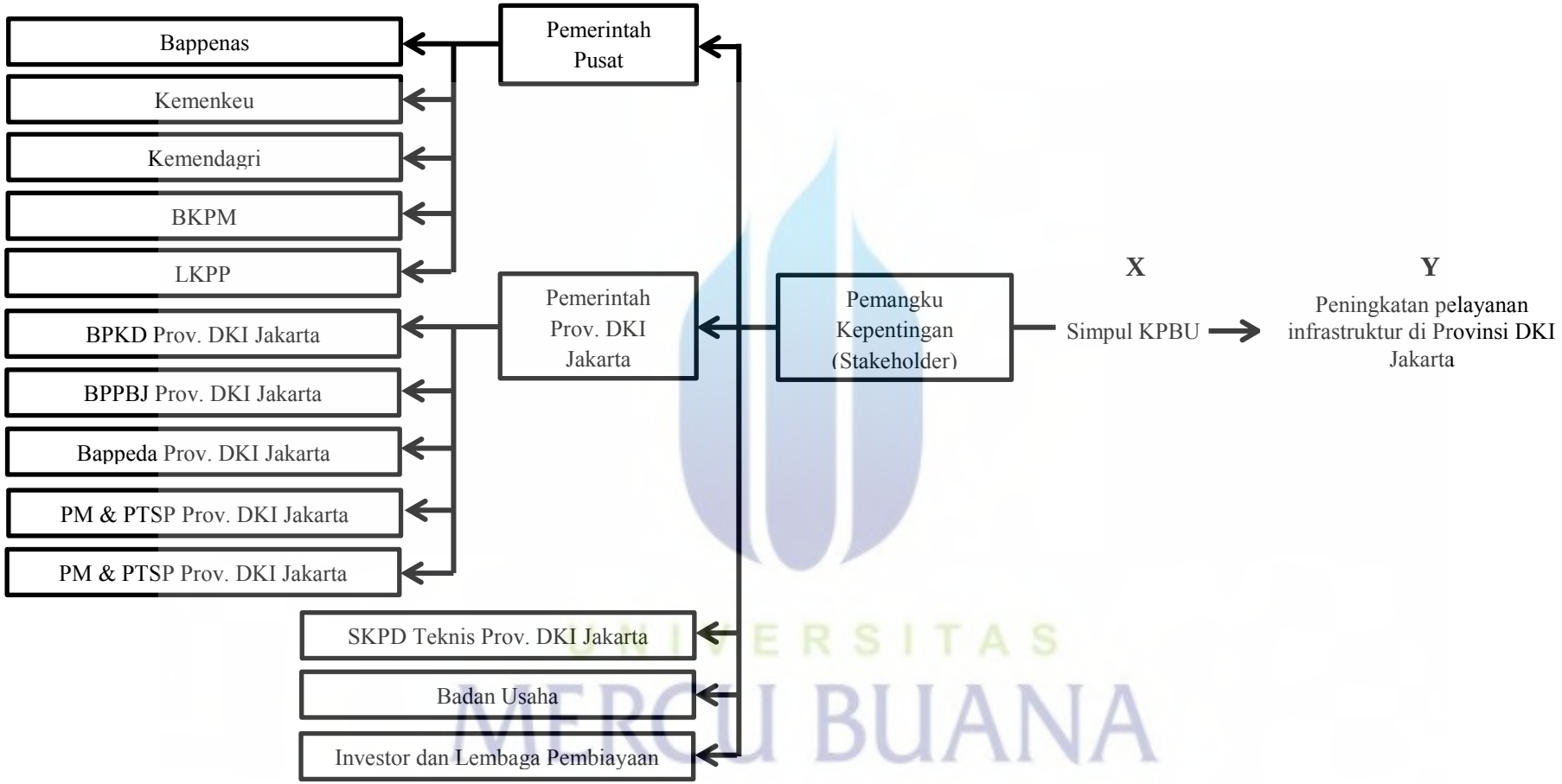

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir peneliti pada hubungan X dan Y pada penelitian Analisis Pihak Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Pada Simpul KPBU Di Jakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Jakarta

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. (Sugiono, 2010)

Variabel bebas atau variabel Independent (dilambangkan dengan X) adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas memiliki fungsi utama sebagai acuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain.

Variabel terikat atau variabel Dependent (dilambangkan dengan Y) adalah sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. variabel ini merupakan hasil yang timbul sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas.

Gambar 2.5 menggambarkan bahwa Simpul KPBU menjadi penentu kesuksesan meningkatnya pelayanan infrastruktur dengan skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta. Kesuksesan yang dimaksud disini adalah, dimana pemerintah dapat berhasil meningkatkan pelayanan infrastruktur dengan skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.7 Hipotesa Penelitian

Bentuk Hipotesa yang peneliti rumuskan dalam judul penelitian Analisis Pihak Pemangku Kepentingan Pada Simpul KPBU Di Jakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur di Prov. DKI Jakarta adalah

H0 : " Jika tidak diketahui peran pihak pemangku kepentingan *(stakeholder)* pada simpul KPBU di Jakarta, maka penyediaan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta tidak efektif dan efisien".

H1 : " Jika diketahui peran pihak pemangku kepentingan *(stakeholder)* pada simpul KPBU di Jakarta, maka penyediaan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta akan efektif dan efisien".

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

http://digilib.mercubuana.ac.id/